



Buletin

Parlementaria

Nomor 989/II/2018 • Januari 2018



TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN

**PALESTINA BERTERIMAKASIH
PADA INDONESIA**

Agresivitas Pemerintah Dalam Berutang Harus Dikontrol

Palestina Berterimakasih pada Indonesia



Pimpinan DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah, didampingi Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf menerima Kepala Biro Politik Hamas, Syekh Ahmad Zuhairi

Pimpinan DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta didampingi Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf menerima surat resmi tanda ucapan terimakasih rakyat Palestina atas bantuan perjuangan rakyat dan para pemimpin Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Surat yang ditandatangani langsung oleh Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh itu disampaikan oleh Kepala Biro Politik Hamas, Syekh Ahmad Zuhairi.

“Ini adalah surat rasa terimakasih, karena protes yang ada di seluruh dunia internasional. Protes terbesar itu adalah protes yang dilakukan masyarakat Indonesia yang diorganisir oleh Majelis Ulama, kemarin,” kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Fahri juga menyampaikan komitmen menjaga Palestina sebagai negara merdeka, dan mendukung kemerdekaan Palestina dengan Ibu Kota Yerusalem.

Selain itu, Yerusalem dan Al-Quds sepenuhnya milik Bangsa Palestina. Dalam kesempatan yang sama, Fadli menyambut baik kedatangan Zuhairi. Dia berjanji bahwa DPR akan memperjuangkan bangsa Palestina dalam forum internasional.

“Terima kasih atas surat yang ditandatangani oleh Ismail Haniyeh terkait dengan perjuangan rakyat Palestina untuk memperjuangkan dan merebut apa yang jadi hak-haknya. DPR dan seluruh Fraksi di DPR serta seluruh Anggota DPR di

berbagai kesempatan dalam forum internasional selalu membawa isu Palestina,” komitmen Fadli.

Ahmad Zuhairi sebagai perwakilan rakyat Palestina mengatakan akan berkomitmen menjaga persatuan antara Hamas dan Fatah demi menjaga Palestina. Zuhairi juga mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang membela bangsa Palestina dalam sidang Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lalu, Jokowi menegaskan sikap Indonesia yang membela bangsa Palestina soal Yerusalem.

“Bangsa Palestina mengapresiasi sangat tinggi kepada bangsa Indonesia dengan kepemimpinan Bapak Jokowi terhadap perjuangan bangsa Palestina,” ungkap Zuhairi. ■ *(eko/sj)*



Penambahan Kursi Pimpinan DPR Harus Matang



Wakil Ketua DPR Korinbang Agus Hermanto

Terkait wacana yang pernah mengemuka tentang penambahan satu kursi Pimpinan di DPR, Wakil Ketua DPR RI Korinbang Agus Hermanto mengakui beberapa saat lalu memang ada rencana penambahan kursi Pimpinan DPR, untuk itulah diajukan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

“Namun di tengah perjalanannya menjadi sedikit agak pudar, karena ada yang meminta lebih dari satu kursi, sehingga perlu dimatangkan kembali,” terang Agus di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/1).

Agus menyampaikan, apabila telah fokus maka hal tersebut akan dibicarakan dalam Pansus Undang-Undang MD3, kemudian juga akan dikoordinasikan dengan pemerintah.

“Sebenarnya saat itu telah ada rencana-rencana, namun ada beberapa fraksi yang pada waktu itu belum menyetujui seratus persen. Masih ada keinginan untuk menambah lebih dari satu kursi. Namun kalau kita lihat,

menambah lebih dari satu kursi maka akan seperti apa yang namanya jabatan pimpinan kalau terlalu banyak,” kata Agus.

Menurutnya, sebaiknya dilakukan focusing saja terlebih dahulu, seperti apa yang akan laksanakan. Kemudian barulah melangkah lebih lanjut yakni dengan melaksanakan revisi UU MD3.

“Kalau nambahnya hanya satu kursi mungkin masih layak jika dilihat dari space dan juga sisi kelayakannya. Tetapi kalau nambahnya dua atau tiga, sepertinya kurang available. Inilah yang perlu dibicarakan, karena sebagian fraksi masih ada yang berpendapat seperti itu,” pungkasnya. (dep/mp)

PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI
WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahaphari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
PIMPINAN REDAKSI
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
WK. PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
REDAKTUR
Suciati, S.Sos, Sofyan Efendi
SEKRETARIS REDAKSI
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
ANGGOTA REDAKSI
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,
Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
REDAKTUR FOTO
Eka Hindra, Iwan Armanias
FOTOGRAFER
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah
ADMINISTRASI FOTO
Bagus Mudjiharianto
ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: bag_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah,

Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,

DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)

ADMINISTRASI

Sjaefudin, S.Sos

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Mujiono

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Remon,

Yuliana Puspita, Ifan

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Revisi UU MD3 Dilakukan Akhir Periode DPR

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sebagaimana masa sidang sebelumnya, DPR telah memutuskan untuk memperpanjang pembahasan Undang-Undang MD3 dalam Prolegnas. Yang berarti masih akan menjadi agenda pada masa sidang yang akan datang.

“Kalau kita melihat trend dimasa-masa yang lalu, setiap akhir periode DPR biasanya diakhiri dengan perubahan Undang-Undang MD3. Kami juga membuat kajian yang lebih komprehensif di Tim implementasi Reformasi, karena ada keinginan perubahannya itu lebih substantif,” ucap Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/1).

Undang-Undang ini namanya kadang-kadang agak lucu, lanjut Fahri, MD3 berarti MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Padahal DPRD nya sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Pemda.

“Sehingga pada waktu itu ada ide-ide yang berkembang, kenapa namanya tidak disesuaikan saja menjadi Undang-undang Lembaga Perwakilan atau Undang-Undang Legislatif. Ada juga yang mengatakan, undang-undangnya kita pisah antara DPR, MPR, dan DPD,” jelasnya.

Pimpinan DPR Korkesra ini juga memaparkan, nanti bisa dibuat satu undang-undang tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perwakilan. Sehingga pengelolaan kawasannya dikelola oleh satu badan khusus. “Itu adalah arah dari reformasi DPR yang kita bahsa selama ini,” tegasnya.

Terkait masalah pergantian Ketua DPR, Fahri mengatakan, begitu surat DPP Golkar masuk maka akan langsung diproses untuk melakukan pelantikan. Sementara sehubungan dengan informasi yang berkembang di lapangan bahwa pergantian Ketua DPR akan dibarengi dengan penambahan jumlah kursi pimpinan, Fahri menjelaskan bahwa untuk melakukan hal itu syaratnya adalah harus dilakukan perubahan undang-undang. ■ (dep/mp)



Wakil Ketua DPR RI Korkesra Fahri Hamzah

Foto: Japri/ind

Pemerintah Harus Kontrol Agresivitas Hutang

Pemerintah baru saja melakukan tutup buku laporan kinerja tahun 2017. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon pun memberikan sejumlah catatan yang diberikan oleh atas laporan kinerja pemerintah tersebut. Terutama tentang risiko atas terus meningkatnya jumlah utang Indonesia. Fadli mengimbau agar agresivitas pemerintah dalam berutang harus dikontrol.

Fadli menyatakan, pemerintah juga selalu membandingkan rasio utang Indonesia yang masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 56,22 persen PDB, Amerika Serikat yang mencapai 107 persen PDB,

Fadli menyampaikan sebagai sebuah gambaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya sekitar 5 persen, namun pertumbuhan utangnya mencapai 13 hingga 14 persen per tahun. Menurut laporan pemerintah, realisasi defisit tahun 2017 tercatat Rp 345,8 triliun. Secara nominal, realisasi defisit tersebut memang lebih rendah ketimbang realisasi defisit tahun 2016, yang mencapai Rp 367,7 triliun.

“Namun, meskipun secara nominal jumlahnya turun, namun persentasenya terhadap PDB justru meningkat. Tahun 2016, rasio defisit APBN-P terhadap PDB mencapai 2,46 persen. Tahun 2017, angkanya naik menjadi 2,57 persen terhadap PDB,” ucap Fadli dalam rilis yang diterima Parlemen, Kamis (4/1).

Fadli mengatakan, selama pemerintahan Jokowi, rasio defisit memang cenderung terus membesar. Pada 2014, defisit masih berada di angka Rp 227,4 triliun, atau 2,26 persen terhadap PDB. Tahun berikutnya, 2015, defisit melonjak menjadi Rp 318,5 triliun, atau mencapai 2,8 persen terhadap PDB. Antara 2015 ke 2016 persentasenya memang sempat turun, namun sebagaimana yang kita lihat, realisasi defisit tahun 2017 kembali meningkat.

“Kenapa kita harus memperhatikan soal defisit anggaran ini, selain karena ketentuan mengenai hal itu telah diatur tegas oleh UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, juga karena pemerintah selama ini selalu menutup defisit dengan menciptakan utang baru, poin yang juga diatur tegas oleh UU yang sama,” ungkap politisi F-Gerindra itu.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Jika diperhatikan, tambah Fadli, sekitar 75 hingga 80 persen pembiayaan defisit APBN memang ditutup oleh utang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, sambung Fadli. Menurutnya, hal itulah yang harus diwaspadai, karena berdasarkan pengamatannya, pemerintah terlalu mengampangkan persoalan jika membahas masalah utang ini.

“Selama ini pemerintah selalu berdalih jika rasio utang kita masih dalam batas aman, karena masih di bawah angka 60 persen terhadap PDB sebagaimana yang dipatok UU. Menteri Keuangan, misalnya, pernah membandingkan rasio utang kita saat ini dengan tahun 2004, saat rasio utang kita mencapai 50 persen terhadap PDB,” ujarnya.

ataupun Jepang yang bahkan mencapai 239,27 persen PDB. Perbandingan semacam itu dianggapnya keliru, karena tidak memperhatikan kemampuan bayar yang berbeda-beda dari negara-negara tadi.

“Setiap negara memang berbeda kasusnya. Belajar dari krisis utang Eropa, rasio utang sebenarnya bukan merupakan indikator yang pas untuk mengukur kemampuan sebenarnya dari perekonomian sebuah negara. Rasio utang kita yang lebih kecil tak menggambarkan perekonomian yang lebih hebat atau sejenisnya, sehingga kita harus berhati-hati,” tandas politisi asal dapil Jawa Barat itu. ■ (dep, sf/ sr)

Komisi II Dukung Pembentukan Satgas Anti Politik Uang

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mendukung pembentukan Satgas Anti Politik Uang oleh Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Pembentukan satgas tersebut sangatlah tepat menghadapi Pilkada serentak tahun 2018. Karena itu saya sangat mendukung gagasan itu,” tandas Zainudin saat dihubungi Parleментарaria, Rabu (3/1).

Menurut politisi Golkar tersebut, ada beberapa kerawanan yang diperkirakan akan muncul di 171 tempat yang akan melaksanakan Pilkada. Diantaranya, maraknya politik uang, meningkatnya penggunaan isu SARA dan perang di medsos yang akan memunculkan isu-isu hoaks dan kampanye hitam serta fitnah yang akan bertebaran.

Khusus untuk politik uang, Pimpinan Komisi II DPR ini memprediksi pasti akan marak karena

dari 171 tempat digelarnya pilkada itu ada daerah-daerah yang berpenduduk dengan jumlah cukup besar. “Untuk itu saya menyambut baik dan mendukung gagasan Pembentukan Satgas Anti Politik Uang. Dengan adanya satgas ini diharapkan bisa meminimalisir kecurangan pada pilkada akibat politik uang,” ia menandaskan.

Kepada institusi Polri dan KPK, dia mengharapkan dapat bekerjasama dengan Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) untuk memaksimalkan peran Satgas yang terbentuk ini. ■ (si/mp)



Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali

Foto: Olfiji/ad

Penumpukan Kapal Picu Konflik Nelayan

Pemberlakuan pelarangan kapal tangkap cantrang sejak awal tahun 2018 ini yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 telah menyebabkan terjadinya penumpukan kapal di pelabuhan, sehingga kolam pelabuhan terlihat penuh sesak oleh kapal-kapal yang bersandar. Sebagaimana yang terjadi pada pelabuhan di Kota Tegal, Jawa Tengah.



Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto

Foto: Jukal/jk

Terkait hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut. lebih lanjut ia menilai bahwa peristiwa tersebut telah memicu adanya konflik horizontal baik antar sesama nelayan, dan vertikal antara nelayan dan pemerintah. Mengingat selama ini tidak sedikit nelayan yang melayangkan protesnya akan kebijakan tersebut, plus menuntut keadilan ekonomi sebagai hak warga negara yang juga harus dilindungi oleh konstitusi negara.

“Menumpuknya kapal tangkap cantrang di Pelabuhan Tegal dan pelabuhan lainnya akibat pemberlakuan pelarangan menangkap bagi Kapal Cantrang sejak satu Januari tahun 2018 ini berimplikasi pada tidak melautnya nelayan karena takut ditangkap. Sehingga dapat memicu terjadinya pengangguran terbuka dan meningkatnya jumlah orang miskin karena kehilangan mata pencaharian. Tidak hanya itu hal itu juga memicu konflik horizontal sesama nelayan dan vertikal nelayan dengan pemerintah. Karena nelayan menuntut

keadilan ekonomi sebagai hak warga negara yang juga harus dilindungi oleh konstitusi Negara,” papar Hermanto saat dihubungi Parlemen, Selasa (2/1).

Oleh karena itu untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya efek buruk tersebut, maka Politisi dari Fraksi PKS ini meminta pemerintah harus segera merevisi peraturan penangkapan cantrang. Tentu saja dengan memuat

aturan yang memberikan seluas-luasnya bagi nelayan untuk melaut, namun dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup.

“Pemerintah harus memperhatikan UUD NKRI 1945 yang memberikan seluas-luasnya bagi rakyat untuk mencari lapangan hidup dan pemerintah harus melindungi nelayan yang notabene merupakan bagian dari rakyat Indonesia,

”tegasnya.

Sebagaimana diberitakan media massa, sejak diberlakukan larangan cantrang Senin (1/1/2018) kemarin, dua pelabuhan di Kota Tegal langsung dipenuhi perahu yang sandar. Pelabuhan Timur yang merupakan pelabuhan niaga, dan pelabuhan ikan di Jongor juga penuh dengan kapal nelayan cantrang yang tidak melaut. ■ (Ayu/mp)

Pemerintah Perlu Contoh AS Soal Reformasi Pajak

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memangkas pajak untuk korporat dari 35% menjadi 15-21% dan akan mengurangi beban pajak untuk individu. Pemerintah Indonesia perlu mencontoh langkah reformasi pajak AS ini di tengah ketidakpastian ekonomi.

Nilai reformasi pajak yang disetujui di AS sebesar USD1,5 triliun. AS begitu berani memangkas PPh badan hingga 15%. “Bandingkan dengan Indonesia yang masih terbilang tinggi yaitu sebesar 25%. Di ASEAN saja Indonesia masih tinggi. PPh Singapura 17%, Thailand 23%, dan Malaysia 24%.” Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi, Rabu (3/1).

Menurut politisi Partai Gerindra ini, pemangkasan PPh badan atau korporat adalah insentif yang bagus bagi dunia usaha, sekaligus menstimulus tumbuh kembangnya usaha nasional. Bila pemerintah tetap bertahan dengan kebijakan pajak yang tinggi, maka daya saing perekonomian nasional akan terus terpuruk. Di negara-negara ASEAN, para pengusahanya diberi insentif pajak rendah sehingga daya saingnya lebih baik.

“Saya berharap pajak jangan jadi instrumen satu-satunya untuk menutup defisit APBN dan pembayaran bunga utang yang jatuh



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

Bila pemerintah tetap bertahan dengan kebijakan pajak yang tinggi, maka daya saing perekonomian nasional akan terus terpuruk.

tempo. Pajak itu harus dikembalikan pada tujuannya semula, yaitu sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Kalau pajak dijadikan sebagai sumber pendapatan utama, maka saya yakin dalam waktu tidak terlalu lama APBN kita pasti terancam,” tandas politisi dari dapil Jabar IV ini.

Dunia usaha sebagai motor perekonomian, lanjut Heri, tak bisa berkembang bila terus dibebani pajak yang terlalu tinggi. Apalagi, selain pajak masih ada pungutan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak alias PNBP yang mencapai lebih dari 60 ribu jenis pungutan. Reformasi pajak di AS ini harus jadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau ulang sistem perpajakan nasional.

“Pemerintah harus berani menurunkan tarif PPh badan hingga ke level yang paling proporsional. Kisarannya antara 15-17%. Angka tersebut tetap memperhatikan upaya perluasan basis pajak. Ini akan menjadi insentif bagi dunia usaha sehingga punya daya saing yang berimbang, khususnya di kawasan ASEAN,” seru Heri.

Menurut Heri, reformasi perpajakan bisa dimulai dengan mengagendakan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU PPh, dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, perubahan sistem pajak dapat pula dilakukan secara simultan dengan perbaikan administrasi perpajakan serta peningkatan kapasitas dan integritas aparat pelayanan pajak. Ini dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan sehingga meminimalisir sengketa dan kebocoran pajak. ■ (mb/sc)



Anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily

Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan target pemerintah menetapkan 5 juta sertifikat tanah terlampaui ambisius. Pasalnya hal tersebut tidak dibarengi dengan dukungan sumber daya aparatur di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN).

“Target yang tinggi sejatinya dibarengi dengan dukungan sumber

Target 5 Juta Sertifikat Ambisius

Pemerintah menyampaikan ada sekitar 1 juta sertifikat tanah dari target 5 juta sertifikat yang belum terealisasi untuk didistribusikan kepada masyarakat pemilik tanah.

daya aparatur di Kementerian Agraria/BPN yang kuat. Pasalnya, sejauh ini dukungan SDM-nya masih belum seimbang dengan target yang ditetapkan. Misalnya, apakah juru ukur tanah di setiap daerah sudah berimbang dengan target yang ditetapkan,” ungkap Ace melalui pesan singkat kepada Parleментарia, Jumat (5/1).

Maka dari itu, Sekjen Partai Golkar ini berharap di tahun selanjutnya BPN harus lebih meningkatkan jumlah sumber daya aparatur untuk mendukung program yang sangat strategis ini. Pasalnya, dengan adanya sertifikat tanah yang dilakukan di berbagai daerah, tentu akan membuka ekonomi baru di beberapa daerah.

“Orang jadi memiliki kepastian

hukum atas hak kepemilikan tanah. Tanah itu bisa digunakan untuk usaha dan lain-lain,” jelasnya.

Diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memang berhasil menerbitkan 5,42 juta sertifikat lahan pada 2017, tapi baru 4,2 juta sertifikat yang terdistribusi. Salah satu alasan kurang terealisasinya target terkait dengan adanya sengketa tanah. Namun tahun ini, pemerintah tetap optimis dapat memenuhi target sertifikat sebanyak 7 juta sertifikat.

Sebagai informasi, sertifikasi tanah dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya pengukuran, pengumpulan data yuridis, pendaftaran, serta yang terakhir pemetaan tanah, kemudian barulah penerbitan sertifikat. ■ (nm/sc)

Dispenser SPBU Butuh Audit Ulang

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo mengungkapkan temuannya kepada Parleментарia saat dihubungi Jumat (5/1). Menurutnya, BPPT perlu melakukan audit teknologi terhadap semua dispenser di SPBU. Beberapa waktu lalu di Semarang, Jawa Tengah misalnya, ia menemukan di sebuah SPBU dengan melakukan uji volume BBM. Pada alat takaran 20 liter ternyata ada kekurangan sebesar -0,7. Jika ini dibagi 20 liter, maka didapatkan hasil -0,35 tiap liternya.

“Saya Melakukan pembagian 100 untuk mendapatkan nilai persentase. Jadi $0,35 : 100 = 0,0035$ dikali rupiah. Jadi, $0,0035 : 20 \text{ liter} = @ \text{Rp } 6.550 : \text{Rp } 131.000$. Tiap $0,0035$ kali $131.000 : \text{Rp } 458$ (untuk 20 liter), jika dibagi 20 liter

Audit ulang terhadap penggunaan dispenser di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) perlu dilakukan kembali. Pasalnya, di beberapa SPBU ditemukan kecurangan yang dilakukan pemilik SPBU. Kementerian Perdagangan dan Kementerian ESDM tak menerapkan standar dispenser secara baik dan hanya mengandalkan hasil akhir dalam bentuk uji tera.

tadi, berarti ada kekurangan Rp 22,9 tiap liternya. Nah, di SPBU itu rata-rata BBM terjual 18-19 kilo liter per hari. Silakan dikalikan sendiri. Ini satu dari beberapa fakta yang terjadi,” ungkap Mukhtar.

Kekurangan volume atas hak pembeli BBM, lanjut politisi Hanura itu, selalu berkurang. Bila dikalikan dengan berapa banyak BBM terjual tiap hari, bulan, dan tahun, berapa banyak kerugian konsumen dan berapa

banyak pula keuntungan yang diraup pemilik SPBU. Sementara di Indonesia terdapat kurang lebih 7600 SPBU. Mukhtar ingin memastikan alat ukur di setiap SPBU terukur dengan adil. Hal yang mungkin dianggap kecil ini, perlu dicarikan solusinya.

Sedangkan kewenangan uji tera saat ini sedang dalam masa transisi untuk dilimpahkan dari Dinas Perdagangan Provinsi ke Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota. Sayangnya,



Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo

pelimpahan ini tak didukung dengan SDM yang memadai. Alat tera dari Kementerian Perdagangan lewat Direktorat Metereologi telah dibagi secara masif ke setiap Kabupaten/Kota lewat UPTD masing-masing. Faktanya, SPBU justru tak siap dengan SDM-nya.

“Saya menilai SPBU memang belum siap dengan SDM dan peralatannya. Pertamina sendiri mengeluhkan atas banyaknya permintaan tera ulang yang lambat direspon pemerintah. Akibatnya, beberapa alat ukur tidak segera bisa dioperasikan. Persoalan ini jadi pintu masuk bagi pelaku usaha BBM yang bermental buruk dengan mengurangi volume takaran. Hak masyarakat pun tergerus,” keluh politisi dari dapil Sulse I ini.

Akibat kecurangan pelaku usaha SPBU, Pertamina menanggung citra buruk. Perlu upaya maksimal dan koordinasi antara Pertamina, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perdagangan untuk memastikan volume BBM yang dijual ke masyarakat tidak berkurang. Ditambahkan Mukhtar, BPH Migas bisa menjembatani persoalan krusial ini.

“Saya sendiri merekomendasikan BPPT untuk membuat alat tera BBM digital. SPBU wajib melakukan tera ulang secara berkala sesuai aturan. Dengan begitu, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan, bisa complain langsung ke SPBU setempat. ■ (mbh/sc)

Arab Saudi Terapkan PPN, Ujian Sinergitas Kemenag dan BPKH

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menilai penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) mulai awal 2018 oleh Pemerintah Arab Saudi menjadi ujian pertama bagi sinergi antara Kementerian Agama dan BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji).



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid.

“Kebijakan PPN oleh Pemerintah Arab Saudi menjadi ujian pertama bagi sinergitas antara Kemenag dan BPKH. Kebijakan PPN itu bisa dipastikan akan menaikkan biaya umrah dan haji Indonesia. Tidak hanya itu dampak signifikan juga perlu diwaspadai bukan hanya angka 5 persen tapi *multiplier effect* dari 5 persen itu ditambah budaya pengusaha Arab Saudi dalam memanfaatkan peluang kenaikan,” ungkap Sodik.

Oleh karena itu pemerintah (baik Kementerian Agama maupun BPKH) harus bersinergi dan bekerja keras agar kebijakan PPN itu tidak berdampak signifikan terhadap BPIH (Biaya perjalanan ibadah haji).

Dilanjutkan politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, ada beberapa langkah yang bisa dan harus dilakukan pemerintah, diantaranya meminta pemerintah Arab Saudi agar secara ketat melakukan pengawasan kenaikan harga akibat PPN, terutama yang terkait produk dan jasa haji, seperti sewa rumah, sewa kendaraan, sewa property dan jasa catering dan lain-lain.

Kemenag juga harus melakukan evaluasi struktur dan jenis pengeluaran BPIH selama ini. Misalnya rencana penambahan makan di Arab Saudi ditinjau ulang, menekan biaya di dalam negeri, memperbanyak pengangkutan oleh Garuda, meninjau besaran dan waktu pembagian *living cost* bagi jamaah, kepandaian negosiasi dan lain sebagainya.

Sodik juga berharap agar adanya sinergi yang lebih produktif antara Kemenag dan BPKH, dimulai dari kegiatan negosiasi sampai kontribusi dari investasi dana haji yang ditangani BPKH. BPKH sendiri baru bekerja kurang dari satu tahun dan sampai tutup tahun 2017 dana haji belum diserahkan kepada BPKH, alias masih ditangani Kemenag. Akan tetapi DPR akan meminta agar BPKH bisa bekerja maksimal yakni membantu Kemenag dalam proses negosiasi, serta memberikan kontribusi maksimal dari investasi yang telah dilakukan.

“Di sini saya juga menghimbau kepada calon jamaah haji, bahwa hampir dipastikan akan ada kenaikan biaya haji akibat kebijakan Arab Saudi tersebut. Saya berharap diantisipasi dengan tenang dan tawakal. Kami (DPR RI) akan terus memantau, mendorong dan meminta pemerintah untuk berusaha semaksimal mungkin melakukan berbagai usaha untuk menekan dampak kenaikan harga akibat PPN Arab Saudi tersebut,” pungkasnya. ■ (ayni/mp)

Perubahan Cuaca Harus Diperhatikan Pemerintah

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan secara serius pada perubahan cuaca dan mulai intensifnya turun hujan yang berakibat langsung pada produksi dan distribusi pangan. Angin puting beliung di berbagai wilayah serta tanda-tanda bencana seperti longsor dan kebakaran saat menghadapi pergantian musim kemarau menuju musim hujan mulai tampak di beberapa titik di Indonesia.

Pada produksi pangan, lanjut Akmal, terutama pangan pokok seperti beras sangat terpengaruh oleh kondisi musim hujan yang memberikan dampak pada kualitas gabah yang rendah karena kandungan air yang tinggi, hingga pada kegagalan panen akibat hama penyakit yang semakin pesat pertumbuhannya. Kandungan air pada gabah dapat diatasi dengan teknologi pasca panen, namun gagal panen dapat menimbulkan rentetan masalah dimulai dari manajemen stok hingga tata niaga yang berujung pada keresahan masyarakat baik petani sebagai produsen maupun masyarakat umum sebagai konsumen.

Dengan kondisi mata rantai distribusi yang belum baik ditambah kondisi musim hujan yang juga mengganggu produksi pangan sehingga tidak optimal, maka saat ini tantangan berat bangsa ini adalah masalah manajemen stok pangan.

“Saya yakin pemerintah sudah menyadari bahwa pada musim hujan yang sangat intens ini akan menimbulkan dampak serius pada bencana sekaligus mempengaruhi kondisi pangan baik produksi,



Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin

muncul HET (harga eceran tertinggi) pada beras premium. Ketika harga bawang jatuh, di daerah Jawa Tengah, pemerintah terlihat acuh sehingga penyelesaian masalah yang dihadapi petani bawang tidak segera mendapat penyelesaian sesuai harapan.

“Permasalahan bawang pada awal tahun hampir selalu terjadi. Rutinitas ini seperti ritual buruk yang tidak dapat diatasi. Padahal baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah punya potensi yang besar untuk mengatasi persoalan yang selalu berulang ini. Pemerintah sangat mampu beli bawang rakyat, apakah itu melalui Bulog ataupun BUMD yang dapat dibentuk oleh pemerintah daerah. Bahkan bila ini dilakukan, pemerintah mampu mendapat keuntungan,” urai legislator daerah Sulawesi Selatan II ini.

Bulog, lanjut Akmal, perlu diberikan instrumen lebih pada penanganan masalah bawang yang selalu berulang ini. Banyak rakyat miris dengan respon pemerintah ini karena kelambatannya pada pertolongan yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat, namun sangat *slow respon*. Kemampuan pemerintah daerah bila hanya menginstruksikan PNS di lingkungannya untuk menyerap 111,46 ribu ton bawang merah tidak akan sanggup meski harga yang diberlakukan hampir 3 kali lipat dari Rp 6 ribu ke Rp 15 ribu. Yang paling dibutuhkan adalah instrumen penyelamatan dengan serapan masif pada harga layak yang nantinya dapat dijual pada waktu yang tepat.

“Semoga peringatan ini dapat ditangkap pemerintah, bahwa mengawali tahun 2018 pemerintah dapat memberikan prestasi kenyamanan sosial pada rakyat kecil seperti petani bawang merah. Evaluasi kelemahan-kelemahan 2017 dapat menjadi rujukan agar permasalahan pangan yang kemungkinan terjadi di 2018 dapat diantisipasi sehingga permasalahan tidak muncul kembali,” mantapnya. ■ (hs/sc)

Pemerintah sudah menyadari bahwa pada musim hujan yang sangat intens ini akan menimbulkan dampak serius pada bencana sekaligus mempengaruhi kondisi pangan baik produksi, distribusi maupun tata niaganya

distribusi maupun tata niaganya,” ujar politisi F-PKS ini, baru-baru ini.

Akmal mengatakan, bahwa gejala masyarakat pada segmen petani saat ini adalah pada petani bawang. Beberapa kalangan membandingkan sikap pemerintah yang tidak konsisten pada respon pangan ini. Pada momen tertentu, ketika harga pangan mendapat harga yang baik, dan banyak konsumen tidak keberatan pada harga pangan tersebut karena produk pangan itu dalam kategori premium. Namun respon pemerintah sangat agresif terhadap harga yang tinggi sehingga

Subsidi Benih Padi Dihapus, Petani Kian Tertekan

Mengawali tahun 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan tidak populis dengan menghapus subsidi benih padi. Kebijakan ini dipastikan menekan para petani sekaligus menurunkan gairah menanam padi. Rp 1,3 triliun nilai subsidi per tahun rencananya akan dihapus pada 2018 ini.



Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono

Foto: Ojijel/ind

subsidi juga tidak terserap maksimal.

Ditambahkan anggota F-Gerindra ini, saat benih padi unggulan bersertifikat menjadi mahal, mungkin saja para petani memilih benih sendiri yang kualitasnya tidak terjamin. Akhirnya, benih yang beredar di kalangan petani adalah yang berkualitas rendah dengan rendemen yang tidak maksimal. “Dicabutnya subsidi benih ini tak hanya menyurutkan semangat petani, PT. Pertanian sendiri mengaku kecewa, apalagi saat ini mereka sedang menyiapkan varietas baru,” ungkap Bambang.

Varietas itu adalah Impari 30, Impari 32, dan Impari 33 yang digadang-gadang mampu menggantikan varietas Ciherang yang selama ini sudah menjadi andalan petani. Varietas Impari disinyalir akan menghasilkan panen hingga 10 ton per hektar. Sedangkan Ciherang 8 ton per hektar area penanaman padi. Rasa dua

varietas ini hampir sama. Hanya saja produktivitas Impari lebih unggul.

“Saya geram dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada petani. Kita mengharapkan tidak hanya subsidi pupuk saja yang diberikan, melainkan subsidi benih juga harus diberikan sehingga bisa sinkron. Keduanya, pupuk dan benih sangat dibutuhkan petani. Pemerintah harusnya ada untuk petani, mengapa kini malah menekan petani. Kalau begini terus bukan swasembada pangan, tapi Indonesia justru semakin terpuruk,” imbuh Bambang. ■(mb/sc)

Saat benih padi unggulan bersertifikat menjadi mahal, mungkin saja para petani memilih benih sendiri yang kualitasnya tidak terjamin. Akhirnya, benih yang beredar di kalangan petani adalah yang berkualitas rendah dengan rendemen yang tidak maksimal

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyampaikan hal tersebut dalam rilisnya, Selasa (2/1). “Rencana pemerintah menghapuskan subsidi benih padi untuk petani dikhawatirkan akan membuat gairah petani semakin menciut. Dampaknya, benih padi yang selama ini hanya Rp 2.500 per kg, akan menjadi Rp 11.000 per kg,” paparnya.

Harga tersebut mungkin akan jauh lebih tinggi lagi saat memasuki musim tanam. Permintaan benih akan tinggi dan pasar bebas diberlakukan. Bambang mengkhawatirkan, saat benih padi unggulan menjadi mahal, petani pun malas bertani. Kondisi ini bisa menyusutkan area sawah dan pasokan beras pun akan merosot tajam. Jika area tanam padinya berkurang tentu pupuk



<http://static.panoramio.com>

DPR Dorong Penguatan Bulog

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo mendorong penguatan Bulog (badan urusan logistik) sebagai salah satu badan yang menstabilkan harga bahan pangan di pasaran, sekaligus menjadi tumpuan para petani untuk menyerap hasil panennya ketika harga di pasaran jatuh.

“Banyak variabel yang ikut mempengaruhi terjadinya kenaikan harga bahan pangan seperti beras di pasaran. Diantaranya kondisi hasil panen yang kurang bagus saat musim panen tiba, bisa juga akibat adanya permainan pasar oleh pihak swasta,” ujar Rahmad, baru-baru ini.

Sejatinya, lanjut Rahmad, tugas Buloglah yang menstabilkan harga bahan pangan di pasaran, sekaligus melakukan penyerapan hasil panen petani. Artinya ketika hasil panen petani berlebih, Buloglah yang akan menyerap hasil panen tersebut dengan HPP (harga pembelian pemerintah) tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Namun ketika hasil panen petani berkurang (paceklik), Bulog jugalah yang akan mendistribusikan beras ke pasaran sehingga stok beras di pasaran tidak kurang, dan masyarakat pun tetap dapat membeli beras dengan harga yang tidak terlalu tinggi.

“Sayangnya, semua itu belum bisa dilakukan oleh Bulog secara maksimal. Dengan batasan HPP

yang ditetapkan pemerintah, ketika hasil panen petani melimpah, Bulog tidak bisa menyerap hasil petani secara maksimal. HPP Beras Bulog ke petani lebih rendah dibanding harga pembelian yang ditawarkan pihak swasta kepada petani. Sudah pasti petani akan lebih memilih menjual berasnya ke pihak swasta yang harga belinya lebih tinggi dibanding menjualnya ke Bulog,” ungkap politisi dari Fraksi Partai PDI Perjuangan ini.

Akibatnya, ketika musim paceklik dimana beras di pasaran berkurang, Bulog tidak memiliki stok beras yang banyak untuk didistribusikan ke pasaran. Pada akhirnya, harga beras di pasaran juga melambung tinggi. Di awal tahun 2018 ini saja, menurut Rahmad, Bulog hanya memiliki stok beras 1 juta ton. Diharapkan pada bulan Maret mendatang stok beras Bulog akan bertambah.

“Diibaratkan, Bulog sebagai pemadam kebakaran, namun tidak diberikan ‘air’ untuk menyiramnya,” tambahnya.

Oleh karena itulah, ia berharap pemerintah

dapat mengkaji ulang kebijakan atau penetapan HPP tersebut, sehingga ada win-win solution bagi semuanya. Dimana ketika petani memasuki masa panen, mereka tidak merugi untuk bisa menjual berasnya kepada Bulog. Begitupun ketika musim paceklik tiba (panen berkurang), masyarakat tidak akan “berteriak” akibat tingginya harga beras di pasaran akibat berkurangnya beras di pasaran.

“Yang pasti di sini negara harus hadir. Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan HPP tersebut, dan segera mencari win-win solution, baik bagi petani maupun masyarakat luas. Bulog juga harus full power untuk menstabilkan harga, buffer stock. Kami di DPR akan terus mendukung selama itu untuk kepentingan masyarakat luas, baik dalam hal penganggaran atau lainnya,” pungkas politisi asal dapil Jawa tengah V. ■ (ayun/sc)



Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo.

Foto: Kresnel/ed

Campur Tangan Asing Perburuk Krisis Iran

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf prihatin atas krisis yang tengah terjadi di Iran. Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini mendukung penuh pemerintah Iran untuk segera menuntaskan masalah dalam negerinya secara damai tanpa menggunakan kekerasan.

“ Saya mendorong dan mendukung pemerintah Iran dapat segera menyelesaikan krisis yang sedang terjadi secara damai. Saya mengharapkan kekerasan di sana segera mereda. Saya percaya Iran dapat secepatnya keluar dari krisis itu,” harap Presiden Geneva *Council on International Affairs and Development* (GCIAD) tersebut, baru-baru ini.

Lebih lanjut perempuan yang juga Presiden International Humanitarian Law di Inter-Parliamentary Union ini menolak keras campur asing atas krisis Iran. Ia menilai campur tangan asing atas krisis di Negeri Mullah tersebut akan mengeskalasi krisis ke arah yang lebih buruk, terutama berdampak buruk terhadap perempuan dan anak-anak. “Saya menekankan pentingnya perlindungan atas kelompok rentan

seperti anak-anak dan perempuan saat konflik berlangsung,” kata dia mengingatkan.

Perempuan yang pernah menjabat dua kali sebagai Presiden Parlemen Perempuan Parlemen Dunia itu kemudian menegaskan, “Sikap kita sangat jelas. Kita menolak segala bentuk campur tangan asing di Iran dan wilayah manapun. Beberapa negara kawasan di sana membuktikan bagaimana campur tangan asing justru memperburuk situasi, bukan memberikan solusi.” tegasnya.

Legislator yang saat ini menjabat Ambassador Woman Political Leader Global Forum (WPL) itu meminta pemerintah Indonesia memberikan dukungan kepada Iran dalam upaya menyelesaikan krisis yang meletus sejak 28 Desember 2017 lalu. “Sebagai



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf

negara Muslim terbesar, demikian juga negara yang berpengaruh di OKI, pemerintah seharusnya cepat merespon yang tengah terjadi di Iran dengan memberikan dukungan penuh agar pemerintah Iran dapat menyelesaikan krisis tanpa campur tangan asing. Saya sarankan presiden kita telpon langsung Presiden Iran,” imbuh Wakil Ketua DPP Partai Demokrat tersebut.

Pada sisi lain, legislator daerah pemilihan Jawa Timur 5 (Malang Raya) tersebut menyampaikan bahwa Parlemen Indonesia dapat berkontribusi dalam upaya menyelesaikan krisis di Iran. “DPR dan parlemen Iran tergabung dalam Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC), yaitu parlemen negara-negara OKI. Pada forum itu kita akan sampaikan dukungan penuh kepada pemerintah Iran. Kita juga akan tolak campur tangan asing apapun bentuknya. Sikap ini kita tunjukkan dengan hadir pada konferensi PUIC ke-13 pada pekan depan di Tehran,” pungkasnya. ■(sc)



<https://cedarjundeng.files.wordpress.com>

Kualitas Pekerja Migran Tantangan 2018



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi

Foto: Ramli/od

pekerja yang bekerja sektor formal, tentunya akan menjadi tantangan bagi pemerintah sehubungan dengan upaya untuk terus mendorong peningkatan penempatan pekerja migran di sektor formal,” kata Dede akhir-akhir ini dalam keterangan tertulisnya terkait evaluasi akhir tahun 2017 terhadap Dinamika Pekerja Migran Indonesia.

Politikus dari Fraksi Demokrat ini menjelaskan, tantangan di atas akan semakin besar bila melihat latar belakang pendidikan para pekerja migran Indonesia. Dia mengutip data dari BNP2TKI yang menunjukkan bahwa dari total 238.467 pekerja migran yang ditempatkan hingga November 2017, sebanyak 70% berpendidikan SD – SMP, 27 persen SMU, dan 3 persen Diploma sampai S1.

Karena itu, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini meminta, agar pemerintah melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kualitas pekerja. “Hal ini perlu dan penting dilakukan mengingat pekerja migran Indonesia yang bekerja pada sektor informal yang paling banyak menghadapi masalah,” papar dia. ■(eko/sc)

Peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia semestinya terus diperbaiki, persoalan ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan secara bertahap akan terjadi pergeseran pekerja migran Indonesia dari sektor informal ke sektor formal.

Dia mengungkapkan, pemerintah seyogyanya melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap kualitas pekerja migran Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Dia mengatakan, pemerintah memiliki tantangan

untuk meningkatkan penempatan pekerja migran di sektor formal, dan secara bertahap pemerintah sebaiknya menghentikan pengiriman pekerja migran pada sektor informal.

“Penurunan juga terjadi pada komposisi pekerja migran pada sektor formal. Penurunan komposisi



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena

Foto: Ramli/od

Komisi IX Awasi Difteri

Wabah penyakit difteri semakin meluas, sampai dengan Desember 2017, tercatat 622 kasus dengan sebaran 169 kabupaten atau kota, di 29 provinsi mengumumkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri, meningkat dari sebulan sebelumnya sebanyak 95 kabupaten atau kota.

Menantang permasalahan ini Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena mengungkapkan, segera setelah masuk masa persidangan DPR pada pekan kedua Januari 2018, Komisi IX akan mengundang raker Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal ini

DPR Dorong Berikan Insentif Bagi Warga Sulit Akses

Penderita penyakit katastrofik tersebar merata di seluruh Tanah Air. Namun, fasilitas kesehatan yang mampu mengobati penyakit katastrofik masih terbatas di kota-kota besar saja. Padahal, sifat pembiayaan program JKN-KIS terhadap penyakit katastrofik tidak terbatas, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama pada peserta yang tinggal di daerah yang minim fasilitas kesehatan.

Ketiadaan RS yang mampu melayani penyakit katastrofik itu membuat pasien penyakit katastrofik di daerah harus dirujuk ke daerah lain. Masalahnya, terhadap mereka, BPJS Kesehatan hanya membayar biaya perawatan RS. Biaya transportasi dan akomodasi harus ditanggung pasien atau keluarga pasien. Dengan kondisi geografis sulit biaya transportasi dan akomodasi itu tak murah.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati mengatakan disparitas *supply side* memang potensial menimbulkan ketimpangan dalam akses Faskes antar kota dan desa. Untuk itu Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu memikirkan skema kompensasi.

“Misalnya pengiriman tenaga, mobile clinic, atau uang tunai untuk pengganti transportasi dan biaya kesulitan akses.

guna membahas wabah penyakit difteri yang terus meluas hingga tutup tahun 2017.

Ermalena memastikan memasuki masa persidangan awal 2018 Komisi IX akan melakukan pengawasan ke berbagai daerah yang terjangkit virus difteri. Dia mengatakan, Komisi IX segera mengagendakan kunjungan kerja spesifik ke daerah KLB difteri. Sehingga bisa diketahui persoalan apa yang membuat wabah terus meluas.

“Juga dalam rangka pengawasan. Kalau di pelosok kan lebih bahaya lagi. Karena untuk mendatangi fasilitas kesehatan dalam rangka perawatan itu jadi tantangan juga



Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati

Perbedaan akses perlu direspon dengan skema insentif agar hak-hak peserta tetap terjamin,” ungkap Okky melalui pesan singkat kepada Parlemen, Jakarta, Jumat (8/01).

bagi kita karena masih banyak puskesmas kita yang belum siap juga,” ujar Ermalena belum lama ini.

Menurutnya, karena keterbatasan dalam berbagai hal, pengawasan DPR tidak bisa langsung ke tingkat bawah, melainkan kunjungan kerja bersifat random ke daerah-daerah yang terjadi KLB difteri.

“Kalau DPR ini kan tidak bisa sampai ke bawah. Kalau ke bawah itu kan kita sifatnya random. Jadi kunjungan kerja ke daerah-daerah KLB, kita datangi. Tapi kan sekarang lagi reses kan, kita tidak ada kunjungan,” kata politikus PPP tersebut.

Selain pengawasan langsung ke

Lebih lanjut, Okky mengatakan perlu dilakukan peningkatan fasilitas kesehatan rujukan regional dan provinsi. “Yang tidak kalah pentingnya yaitu jenis dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, pemerataan kapasitas manajemen RS, peningkatan sarana/prasarana dan alat kesehatan rujukan sesuai standard, integrasi data dan sistem informasi di pusat, daerah, dan RS, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, sebaran rumah sakit yang mampu mengobati

BPJS Kesehatan hanya membayar biaya perawatan RS. Biaya transportasi dan akomodasi harus ditanggung pasien atau keluarga pasien. Dengan kondisi geografis sulit biaya transportasi dan akomodasi itu tak murah

penyakit katastrofik belum merata, saat ini, dari 2.785 rumah sakit (RS) yang ada, hanya 71 RS Kelas A dan 397 RS Kelas B. RS kelas A mampu memberikan pelayanan hingga tingkat subspecialis, sedangkan RS kelas B bisa memberikan layanan spesialis lebih memadai. ■ (ria/mp)

daerah, Ermalena menegaskan, segera setelah masuk masa persidangan DPR 2018, pada pekan kedua Januari 2018 mendatang, Komisi IX akan mengundang Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal ini guna membahas wabah penyakit difteri yang terus meluas hingga tutup tahun 2017 ini.

“Dalam rancangan kegiatan kita, begitu masuk langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengundang Kemenkes, untuk rapat kerja,” ujar Ermalena. ■ (eka/sc)



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir



Pemerintah Tak Cermat Hitung Subsidi Energi

Menyusul penggelontoran dana subsidi energi untuk BBM dan listrik sepanjang 2017 yang melebihi mata anggaran dalam APBN-P 2017, pemerintah dinilai tidak cermat dan tak mampu mengukur harga listrik sekaligus tak mampu pula memprediksi gejolak harga minyak dunia.

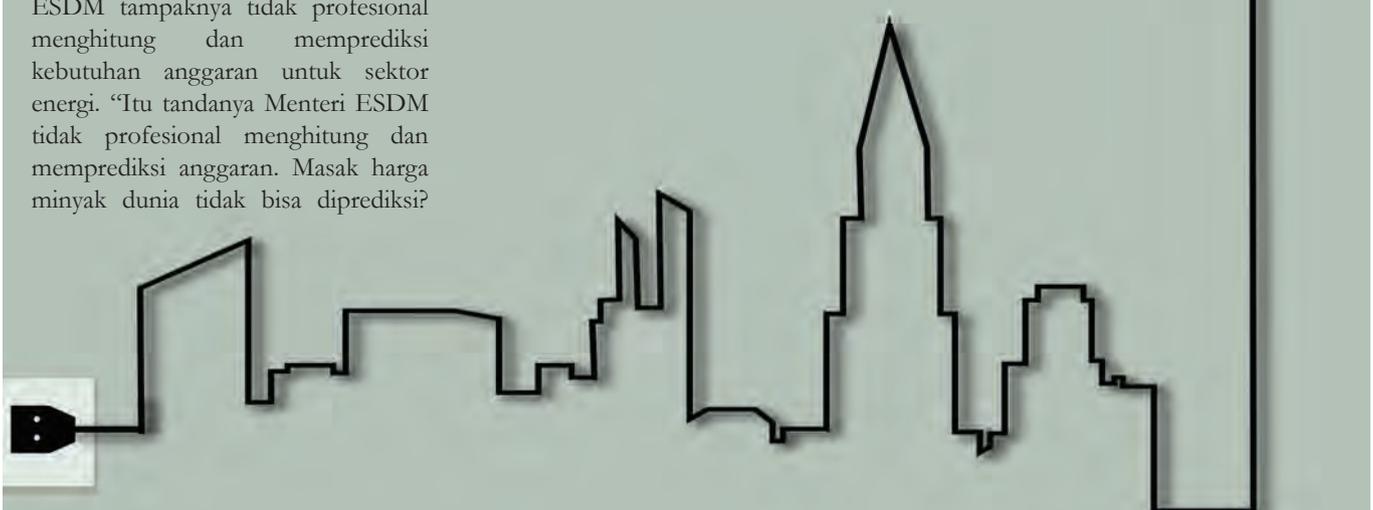
Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya, beberapa waktu lalu dalam konferensi persnya menyatakan, subsidi BBM dan elpiji telah dibayarkan pemerintah sebesar Rp 46 triliun, lebih tinggi daripada APBN-P 2017 yang hanya Rp 44,5 triliun. Sementara untuk subsidi listrik diberikan Rp 50,6 triliun dari yang dianggarkan dalam APBN-P 2017 sebesar Rp 45,4 triliun.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir yang dihubungi lewat sambungan telepon, Rabu (3/1), menilai, Kementerian ESDM tampaknya tidak profesional menghitung dan memprediksi kebutuhan anggaran untuk sektor energi. “Itu tandanya Menteri ESDM tidak profesional menghitung dan memprediksi anggaran. Masak harga minyak dunia tidak bisa diprediksi?”

Masak harga listrik tidak bisa diukur?” ujar politisi PAN tersebut, penuh tanda tanya.

Sebelumnya, Menkeu mengungkapkan, penggelontoran subsidi tersebut lantaran dua BUMN sektor energi, yaitu PT. Pertamina dan PT. PLN mengalami tekanan karena tingginya harga minyak dunia dan kewajiban membayar kurang bayar (carry over) tahun lalu. Menurut Hafisz, pemberian subsidi melebihi mata anggaran boleh saja. Tapi, selama ini sudah banyak kajian yang bisa digunakan pemerintah dalam menghitung kebutuhan anggaran subsidi energi.

“Emangnya selama ini tidak pernah ada kajian? Memberikan subsidi lebih dari yang dianggarkan APBN-P 2017 boleh saja. Tapi, merubah mata anggaran itu kan, berarti pemerintah tidak cermat. Kalau kita kuliah, dapat diartikan tidak lulus, karena tidak bisa memprediksi dalam menjawab persoalan,” kilah mantan Ketua Komisi VI DPR ini. ■ (mb/sc)



P3S Gelar Bazar Murah

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI yang juga Ketua Pembina Persatuan Pensiunan Pegawai Sekretaris Jenderal DPR RI (P3S) Damayanti menyambut baik salah satu program kerja dari P3S yaitu penyelenggaraan bazar dan pasar murah, yang ditujukan untuk penggalangan dana.

“Mungkin hanya ada sedikit dari keuntungan dan kegunaannya, tapi memang sudah dirasakan oleh para pensiunan. Kegiatan seperti ini untuk silaturahmi atau untuk menjenguk orang yang sakit atau memberikan sedikit santunan dan bantuan buat yang meninggal,” ucap Maya, biasa ia disapa, usai membuka acara pasar murah dan bazar yang diprakarsai oleh P3S di Loby Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (3/01).

Lebih lanjut Maya menjelaskan, kegiatan seperti ini sangat perlu untuk digalakkan, sebab jika tidak ada kegiatan seperti ini maka para pensiunan itu tidak akan bertemu. Dan kegiatan seperti ini juga sangat bagus untuk mempererat silaturahmi antar anggota P3S.

“Acara ini sangat bagus. Ini juga menjadi ajang untuk para pensiunan untuk tetap berkarya, silaturahmi dan tetap ada aktivitas. Jadi tidak hanya “nganggur”. Ini aktivitas yang sangat positif yang disambut baik oleh Setjen DPR RI,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua P3S Toib Heriyanto memaparkan bahwa tujuan penyelenggaraan bazar dan pasar murah memang sangat ditekankan untuk pencarian dana, mengingat P3S merupakan organisasi yang isinya anggota-anggota yang sudah sepuh, sehingga kemungkinan sakit dan meninggal tidak dapat dipungkiri.

“Memberikan santunan bagi yang sakit maupun yang meninggal, memang santunan yang kami berikan tidak terlalu besar, relatif kecil, tetapi intinya kan kami membantu karena memang dananya kan terbatas.

Karena kalau kita mengandalkan iuran dari anggota tidak mungkin cukup, makanya diadakan bazar dan kegiatan lainnya. Termasuk ada sumbangan juga dari karyawan Setjen DPR untuk membantu organisasi P3S ini. Jadi intinya untuk santunan,” ucap Toib.

Selain itu, Toib juga menjelaskan saat ini anggota P3S berjumlah 700 anggota, akan tetapi kondisi yang masuk dan keluar juga cukup seimbang, seperti contoh pada tahun 2017, ada 86 anggota P3S yang meninggal, dan 60% lainnya sakit. Jadi menurutnya, kegiatan macam ini bisa sangat meringankan beban dari pada yang bersangkutan.

Sebagai informasi, penyelenggaraan pasar murah dan bazar berlangsung dari tanggal 3 Januari hingga 5 Januari 2018, dari pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. ■ *(indy/ mp)*



Plt. Sekjen DPR RI yang juga Ketua P3S DPR RI Damayanti

Foto: Arief/ed.

DPR Harus Diisi Para Ahli

Wajah parlemen sepanjang 2017 masih dinilai tidak berbuat banyak oleh publik. Persoalan legislasi kerap menjadi indikator soal kerja parlemen. Untuk memenuhi ekspektasi publik, DPR harus banyak diisi oleh para ahli di bidangnya.



Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah

Foto: Anang/ia

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN Anang Hermansyah mengatakan, ke depan perlu lebih banyak ahli yang masuk menjadi anggota DPR. Upaya tersebut untuk mempercepat akselerasi kerja politik parlemen. “Melihat kinerja parlemen sepanjang 2017, masih ada ketidakpuasan dari publik. Itu harus menjadi catatan penting seluruh *stakeholder*. Menurut saya parlemen harus lebih banyak diisi oleh

anggota DPR yang ahli di bidangnya,” tegas Anang dalam rilis yang diterima Parlementaria, Minggu (31/12/2017).

Menurut Anang, anggota DPR dari wakil kalangan profesional dikenal dalam khazanah parlemen era modern. Menurut dia, kelompok ini mencerminkan keterwakilan fungsional seperti mewakili kelompok profesi, pekerja dan lain-lain. “Kelompok ini disebut sebagai representasi fungsional (*functional*

representation). Meski dalam sistem politik kita, hanya mengenal representasi politik (*political representation*) yakni melalui jalur partai politik namun dalam prakteknya partai politik merekrut banyak caleg dari kalangan profesional,” urai Anang.

Ia pun berkaca pada dirinya yang berlatar belakang musisi yang ditempatkan oleh partainya di Komisi X DPR RI yang diantaranya menbidangi persoalan seni dan budaya. “Penekanan perjuangan yang saya lakukan persoalan pembajakan di industri musik termasuk memperjuangkan regulasi soal permusikan,” tegasnya.

Situasi tersebut, imbuh Anang, akan memudahkan kerja di parlemen karena seorang profesional yang menjadi anggota DPR akan mempercepat akselerasi di bidang yang digeluti baik dari sisi fungsi DPR dalam melaksanakan legislasi, menyusun anggaran serta pengawasan. “Makanya di DPR dibutuhkan dokter, agamawan, mantan birokrat, ahli pertanian, aktivis buruh, budayawan termasuk musisi dan profesi lainnya,” ungkap Anang.

Di bagian akhir, politisi dapil Jawa Timur ini menyebutkan dengan sistem parlemen saat ini dengan dukungan sistem pendukung yang baik seperti Badan Keahlian Dewan (BKD) dapat mempercepat akselerasi kerja konstitusional DPR. “Apalagi diisi oleh anggota DPR yang *expert* di bidangnya, saya yakin akan lahir produk DPR yang brilian dan bermanfaat bagi rakyat,” tandasnys. ■ (6)

DPR Dukung Konsep Ecoregion di Bali

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai Bali harus menerapkan konsep ecoregion yang tidak boleh terpisah dari daerah lain di sekitarnya. Karena tidak mungkin urusan udara dan air itu bisa lepas antara satu daerah dengan daerah lainnya.

“Kalau disebut Indonesia darurat sampah maka sesungguhnya alamatnya adalah ke Bali. 70 persen organik dan 30 persen anorganik, yang 30 persen inilah yang sangat berbahaya. Sampah plastik merupakan sampah yang mengalami degradasi cukup lama. Tali pancing degradasinya sampai 1 juta tahun, tas kresek atau tas plastik 60 tahun, filter rokok 5 tahun, plastik galon 600 tahun. Kalau dibakar menghasilkan dioksin yang membahayakan

bisa membuat kerusakan saluran pernafasan, saraf dan ginjal. Limbahnya pun akan mencemari tanah dan air di Bali,” papar Fikri, begitu ia biasa disapa, melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, Kamis (4/1).

Oleh karena itu menurutnya, Bali perlu menerapkan konsep ecoregion dalam mengelola lingkungan. Sehingga dia tidak dibangun sendiri terpisah dari daerah sekitarnya. Karena tak mungkin urusan udara dan air itu

Sampah Plastik Mengkhawatirkan Pantai Kuta

Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti menyayangkan menumpuknya sampah plastik di Pantai Kuta, Bali beberapa hari belakangan ini. Pasalnya, selama ini Bali menjadi salah satu icon destinasi wisata unggulan di Indonesia yang sangat terkenal di mancanegara. Peristiwa tersebut tentu akan mengurangi keindahan pantai tersebut.



Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti.

“Pariwisata Bali adalah salah satu icon destinasi wisata di Indonesia yang sudah sangat terkenal di luar negeri, sehingga menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga Bali.

Banyaknya sampah di Pantai Kuta dalam beberapa hari belakangan ini tentu sangat mengurangi keindahan Pantai Kuta tersebut. Saya sangat menyayangkannya,” ungkap Linda, begitu Marlinda biasa disapa, melalui pesan singkatnya kepada Parlemen, Kamis (4/1).

Oleh karena itu, politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menilai perlu segera dilakukan koordinasi yang intensif dari Kementerian Pariwisata yang notabene sebagai mitra kerja Komisi X DPR RI, dengan Dinas Pariwisata dan Pemerintah Daerah setempat untuk segera menyelesaikan permasalahan sampah tersebut.

Adanya dugaan ribuan ton sampah yang membanjiri Pantai Kuta merupakan kiriman dari Banyuwangi, Jawa Timur menurut Marlinda hal itu sejatinya harus dibicarakan dan dikordinasikan juga dengan Pemda Banyuwangi untuk ikut mencari solusi, dan bukan sekedar saling menuduh. Pasalnya, tidak tertutup

kemungkinan banyaknya sampah di Pantai Kuta itu juga akan berakibat pada penurunan jumlah wisatawan di pantai tersebut, serta Bali pada umumnya. Penurunan wisatawan itu juga berdampak bagi daerah-daerah lain sekitar Bali, seperti Jawa Timur.

“Tidak bisa dipungkiri, perekonomian Bali juga ikut menopang atau menghidupkan pariwisata daerah sekitarnya seperti Jawa Timur. Sebut saja ketika ada peristiwa bom di Bali beberapa waktu silam, terjadi penurunan wisatawan di Bali, dan ini tidak hanya berdampak bagi masyarakat Bali saja, tapi juga bagi seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah sekitar Bali, seperti Jawa Timur. Contohnya, pengrajin batik yang ikut merosot pendapatannya ketika itu. Oleh karena itu saya berharap agar segera dilakukan koordinasi antara Kementerian Pariwisata, Pemda Bali, Pemda Banyuwangi atau Pemda Jawa Timur untuk segera mencari solusi atas peristiwa ini. Tidak hanya itu, perlunya sosialisasi akan kesadaran wisata bahwa Bali adalah icon Indonesia dan destinasi pariwisata dunia yang harus dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya masyarakat Bali saja,” pungkas Linda. ■ (ayu/sc)

lepas antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga harus dikelola bersama.

Ditambahkan Politisi dari Fraksi PKS ini, bab sampah ini tidak hanya diskusi *open dumping* ataupun *hygienic field*, tapi juga bagaimana mengelola sampah secara regional yang menghasilkan energi maupun produk lain yang bermanfaat. Jika Bali sukses dalam mengelola sampah, maka Bali bisa menjadi contoh sukses bagi daerah lain dalam mengelola lingkungan.

■ (ayu/sc)



Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih.



Plt Sekjen DPR Damayanti memberikan pengarahan saat melepas empat pegawai DPR yang telah memasuki masa pensiun di Ruang Rapat Setjen DPR.

Foto: Jakarta

Masa Pensiun Bukan Akhir Pengabdian

Masa pensiun bukanlah sebuah akhir dari sebuah pengabdian seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada bangsa dan negara. Lebih dari itu seorang PNS yang dapat melewati masa pensiun merupakan suatu pencapaian tinggi yang dapat diraih dan hal tersebut merupakan suatu hal yang pantas disyukuri.

Demikian dikatakan Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti dalam sambutannya saat melepas empat pegawai Setjen DPR RI yang memasuki masa pensiun di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/1). Keempat pegawai tersebut yakni, Mugiyono, Iskandar, Ahmad Nurdin dan Syamsuar.

“Setelah melewati masa pengabdian sekian puluh tahun untuk bangsa dan negara, maka masa pensiun ini juga bisa diisi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Karena satu hal yang pasti merupakan suatu kebahagiaan tersendiri

apabila masa pensiun ini lebih banyak dihabiskan untuk mengisi kegiatan dan berkumpul bersama keluarga,” jelas Maya, sapaan akrab Damayanti.

Lebih lanjut Maya berharap kepada seluruh pegawai yang sudah pensiun tersebut agar dapat menyumbangkan kontribusi dan pemikiran untuk Setjen DPR RI ke depan serta dapat pula aktif sebagai anggota Persatuan Pensiunan Pegawai Sekretariat Jenderal (P3S) DPR RI.

“Saya turut berharap jangan segan untuk memberi masukan dan saran agar Setjen DPR RI bisa lebih baik lagi ke

depannya dan bisa aktif sebagai anggota P3S sebagai wadah untuk berkumpul, bersilaturahmi dan berkomunikasi antar pensiunan Setjen DPR RI. Dalam wadah tersebut juga nantinya kita bisa jadikan sebagai ajang *sharing* antara teman-teman PNS yang masih aktif dan yang sudah purnabakti,” tutur Maya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Ketua P3S Subiyanto Sudarjo dengan berpesan, agar keempat pegawai yang baru memasuki masa pensiun tersebut bisa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh P3S sebagai ajang untuk mempererat dan memperpanjang silaturahmi antar anggota.

“Kami harapkan sekali lagi setidaknya tiga bulan sekali kita bisa bertemu dan mengadakan pertemuan secara berkala. Biasanya dalam setiap pertemuan kita turut menghadirkan Ustad, Dokter, dan Psikiater sebagai suatu bentuk penyegaran jasmani dan rohani,” ungkapnya.

Dalam acara tersebut turut hadir Inspektur Utama (Irtama) Setyanta Nugraha, jajaran pejabat di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, perwakilan dari Korpri, Koperasi, serta Dharma Wanita DPR RI. ■ *(ira/mp)*

Biro Pemberitaan Parlemen Pererat Komunikasi dengan Wartawan

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Y.O.I. Tahapari didampingi Kabag, Kasub dibawah Biro Pemberitaan Parlemen serta Pimpinan Redaksi TVR Parlemen dan Redaktur Media Cetak dan Media Sosial menyambangi Media Center DPR RI yang merupakan tempat kerja dan berkumpulnya wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (5/1).

Karo Pemberitaan Parlemen menyampaikan bahwa kunjungan ke Media Center DPR RI dalam rangka menjalin komunikasi dengan para wartawan yang ada di Parlemen.

“Saya baru saja dilantik menjadi Karo Pemberitaan Parlemen, saya ingin berkenalan dengan wartawan-wartawan Parlemen,” ungkap Tahapari sembari menyalami satu persatu wartawan yang ada.

Dalam kesempatan itu juga, Tahapari mengungkapkan, wartawan merupakan mitra penting Biro Pemberitaan Parlemen, terutama

dalam menyebarluaskan informasi-informasi kedewanan. Ke depan, dia berharap komunikasi yang baik ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan, agar kinerja kedewanan juga bisa disebarluaskan dengan baik.

Saat meninjau Ruang Pengurus Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Tahapari menyampaikan bahwa segala kendala atau kekurangan yang ada di ruang Media Center DPR RI akan dipenuhi dan diperbaiki agar para wartawan bisa bekerja dengan baik.

“Pada tahun 2018 merupakan Tahun Politik, maka kami juga akan membangun komunikasi dengan wartawan yang

ada di DPR RI dengan baik, agar segala informasi kedewanan juga tersampaikan dengan baik. Masyarakat juga perlu tahu bahwa DPR RI juga memiliki tugas yang sangat strategis terutama dalam membangun bangsa,” ungkapnya.

Tahapari juga menyampaikan bahwa pihaknya akan membentuk Tim Redaksi lintas bagian yang akan menganalisis isu-isu aktual yang kemudian akan disampaikan kepada Pimpinan DPR dan juga disebarluaskan secara luas ke wartawan.

“Saya nanti akan meminta Pimpinan DPR RI secara rutin memberikan rilis atau tanggapan terhadap isu-isu aktual yang kemudian nanti akan disebarluaskan ke wartawan, kalau kita bersatu maka kita akan kuat memberikan dukungan terhadap Anggota dan Pimpinan DPR RI dalam menyebarluaskan informasi kedewanan,” ujarnya. ■ (s/kr/mp)



Kepala Biro Pemberitaan Parlemen DPR Yohannes O.I. Tahapari berjabat tangan dengan sejumlah pengurus Koordinatoriat Wartawan DPR RI.

Biro Pemberitaan Parlemen Berperan Sebarkan Informasi Kedewanan

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI memiliki peranan penting dalam penyebaran informasi kedewanan. Sebagaimana diketahui bahwa Biro Pemberitaan Parlemen membawahi 4 Bagian yaitu Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Bagian TV dan Radio Parlemen, Bagian Humas dan Bagian Penerbitan.



Pt Sekjen DPR Damayanti berfoto bersama seluruh Pejabat dan Pegawai Biro Pemberitaan Parlemen DPR di Ruang Abdul Muis.



Foto: Juka

Plt Sekjen DPR RI Damayanti dalam Rapat Koordinasi Biro Pemberitaan Parlemen menyampaikan bahwa Biro Pemberitaan Parlemen memiliki tugas yang lebih spesifik dan beda dengan tugas Biro-Biro lainnya, karena Biro Pemberitaan Parlemen menyebarkan segala informasi yang ada di DPR, Kamis (4/1).

“Tugas penting Biro Pemberitaan Parlemen salah satunya meningkatkan citra positif DPR dan memberikan informasi-informasi yang positif sehingga dapat turut serta dalam mencerdaskan masyarakat,” ungkap Maya sapaan akrab Plt Sekjen DPR RI.

Maya juga menyampaikan bahwa dalam penyebaran informasi oleh Biro Pemberitaan Parlemen harus dibarengi dengan kreatifitas dan konten-konten yang menarik sehingga informasi tersebut bisa tersampaikan ke semua lapisan masyarakat.

“Saya berharap konten-konten informasi yang disebarkan Biro Pemberitaan Parlemen harus lebih variatif lagi atau lebih kekinian,” ungkapnya

Maya juga berharap, Bagian-Bagian yang ada dibawah Biro Pemberitaan Parlemen terus meningkatkan kinerjanya terutama program-program yang sudah berjalan agar bisa tingkatkan lagi baik dari segi konten maupun kemasannya.

Dia juga menghimbau agar semua Bagian yang ada di Biro Pemberitaan Parlemen bisa saling bersinergi baik dalam produksi konten maupun dalam penyebaran informasinya.

Secara umum Plt. Sekjen DPR ini menilai kinerja Biro Pemberitaan Parlemen sudah cukup baik, selain itu banyak Anggota DPR RI yang juga turut mengapresiasi atas kinerja Biro Pemberitaan Parlemen.

Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen YOI Tahapary menyampaikan akan terus meningkatkan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen dan juga akan mensinergikan Bagian-Bagian yang ada di Biro Pemberitaan Parlemen. “Mari kita ciptakan sinergi dan bekerja bersama-sama,” ungkap Tahapary sembari memotivasi seluruh Staf Biro Pemberitaan Parlemen. ■ (skr/mp)



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di dampingi Ketua Koordinator Wartawan DPR RI Romdhoni Setiawan memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan terkait isu-isu terkini antara lain soal dana desa dan Pilkada, di Gedung Nusantara III. Selasa (9/01),
Foto: Rumi Sari B/Od



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menetapkan Marwan Dasopang sebagai Wakil Ketua Komisi VIII menggantikan Abdul Malik Haramain dari Fraksi PKB di ruang Rapat Komisi VIII Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/01). *Foto: Arief/od.*



Plt Sekjen DPR Damayanti didampingi Kepala Biro Pemberitaan Parlemen DPR, Y.O.I. Tahapari dalam acara rapat koordinasi Biro Pemberitaan Parlemen DPR, Kamis (4/01).
Foto: Jaka